

Sekda Butur Mangkir

Contributed by Redaktur
Wednesday, 06 January 2010

Sekda Butur Mangkir

KULISUSU, KEPRES - Hearing atau dengar pendapat antara legislatif dan eksekutif Buton Utara (Butur) terkait pengumuman hasil seleksi CPNSD di gedung DPRD Butur berlangsung alot. Pasalnya, Sekda Butur, Drs Laode Hasirun sebagai ketua panitia seleksi penerimaan CPNSD tahun 2009 yang dipanggil dewan tidak nongol alias mangkir. Dalam rapat pansus DPRD Butur yang berlangsung kemarin, hanya dihadiri kepala BKD Butur, Drs Laombe, perwakilan forum guru honor serta Asisten I Sekda Butur, Drs Laode Baharuddin. Namun kehadiran asisten I itu sempat menimbulkan pertanyaan dikalangan anggota pansus, karena yang bersangkutan tidak pernah dipanggil. Kehadirannya tersebut tidak berlangsung lama karena dalam penjelasannya ia mewakili Pj Bupati Butur, Drs HM Ridwan Zakariah yang sedang berada diluar daerah. Namun forum memutuskan tidak menerima kehadiran asisten I itu, sehingga yang bersangkutan langsung meninggalkan forum. Salah seorang anggota pansus, Harwis Hari sangat geram dan kesal akibat ketidakhadiran Sekda Butur, Hasirun sebagai ketua panitia. 'Salah satu tujuan pertemuan ini adalah untuk memintai keterangan dari ketua panitia seputar pengumuman hasil seleksi penerimaan CPNSD, tetapi kalau ketua panitia tidak hadir ini sama saja dengan pelecehan dewan,' katanya kesal. Senada dengan itu, anggota pansus lainnya, Sujono menyesalkan sikap Sekda Butur yang tidak menghadiri panggilan dewan. 'Ketua panitia seharusnya hadir memberikan keterangan saat dipanggil dewan. Kita hanya sebatas memintai keterangan dari panitia untuk menjawab keresahan masyarakat di Butur,' jelasnya. Ia menambahkan bahwa pada pengumuman hasil seleksi CPNSD di Butur terdapat banyak kejanggalan seperti menghilangnya sejumlah formasi hingga munculnya ijazah siluman yang dinyatakan lolos sebagai CPNSD. 'Mestinya jangan ada dusta diantara kita, sehingga persoalan yang meresahkan masyarakat ini bisa dituntaskan termasuk bisa diketahui pelaku-pelakunya yang harus bertanggungjawab,' katanya lagi.

Sementara aktivis Yas Tampil Sultra, Aleksander Muhammad SH mengatakan, berkaitan dengan sejumlah ketimpangan atas pengumuman hasil seleksi tes CPNSD di Butur, Sekda Butur selaku ketua panitia harus bertanggungjawab baik secara moral dan terlebih secara hukum. Pasalnya, sebagai ketua panitia semua tahapan seleksi termasuk anggota panitia harus diawasi dan dikontrol secara penuh. 'Mestinya Sekda Butur telah mengambil pengalaman pada seleksi sebelumnya yang hingga saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau panitia seleksi tidak hati-hati, bisa jadi penyidikan tahap kedua khusus seleksi di Butur akan terulang lagi dan ini akan menjadi citra buruk bagi pelaksanaan pemerintahan di sana,' katanya. CR3-MAT/B/LEX